

## ANALISIS KEBIJAKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Fraya Nabila<sup>1\*</sup>, Cut Zakia Rizki<sup>2</sup>

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,  
email : [frayaanabila@gmail.com](mailto:frayaanabila@gmail.com)
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,  
email : [zakia\\_rizki@unsyiah.ac.id](mailto:zakia_rizki@unsyiah.ac.id)

### Abstract

*The research aims at analyzing the policy of financial inclusion in Indonesia and the achievement of the policy towards the three main targets of the policy, namely economic growth, poverty reduction and the financial system stability. This study uses secondary data from 2000 to 2016 using qualitative descriptive method. The result show that the dimensions of access and the use of financial inclusion policies dimensions in Indonesia have the impact on economic growth, poverty reduction, and financial system stability. In addition, the dimensions of access and usage in the previous year have a similar trend to the financial inclusion index. This requires that Indonesia be able to perform other strategies to achieve more inclusive finance. It is recommended for further research to add other proxies to see three dimensions of financial inclusion indicators.*

**Keywords :** *Policy of Financial Inclusion, Economic Growth, Poverty Reduction, Financial System Stability, Financial Inclusion Index.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inklusi keuangan di Indonesia serta ketercapaian kebijakan tersebut terhadap tiga target utama dari kebijakan ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu tahunan sejak tahun 2000 hingga 2016 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui dimensi akses dan dimensi penggunaan kebijakan inklusi keuangan di Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu dimensi akses dan penggunaan pada tahun sebelumnya memiliki tren yang mirip dengan indeks inklusi keuangan. Hal ini mengharuskan agar Indonesia mampu melakukan strategi-strategi lainnya guna mencapai keuangan yang lebih inklusif. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan proksi-proksi lainnya untuk melihat tiga dimensi indikator inklusi keuangan..

**Kata Kunci :** Kebijakan Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan, Stabilitas Sistem Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan.

## PENDAHULUAN

Krisis tahun 2008 memunculkan sebuah fenomena global baru yang menjadi pusat studi dalam berbagai kajian moneter yang memusatkan perhatian pada kelompok masyarakat *unbank*, kemudian melahirkan istilah keuangan inklusif. Penyertaan keuangan ke dalam strategi ekonomi, terutama pada kebijakan moneter menjadi perhatian utama, terutama pada kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan.

Inklusi keuangan telah menjadi salah satu program penting dari Tujuan Pembangunan Millenium PBB (MDGs). Inklusi keuangan mencoba membuka akses terhadap layanan keuangan untuk orang-orang yang biasanya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan. Keterbatasan akses keuangan akan menghambat akumulasi modal terhadap masyarakat *unbank* atau masyarakat yang tidak memiliki dan menggunakan jasa keuangan formal. Kondisi ini akan menghambat kemampuan masyarakat untuk memperbaiki tingkat perekonomiannya.

Inklusi keuangan adalah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi (Sarma,2008). Dengan kata lain secara sederhana inklusi keuangan adalah akses terhadap jasa-jasa keuangan baik berupa kredit, tabungan, pembayaran dan asuransi yang mampu dijangkau oleh semua orang termasuk masyarakat yang tidak tersentuh oleh jasa-jasa perbankan (*unbanked*).

Inklusi keuangan suatu negara dapat diukur dari indeks keuangan inklusifnya. Indeks keuangan inklusi (IKI) merupakan indeks yang pengukurannya menggunakan indeks multidimensional dan data-data makroekonomi sehingga indeks keuangan inklusif dapat mencakup beberapa dimensi inklusi keuangan seperti akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.

Inklusi keuangan di Indonesia memiliki tujuan untuk pembangunan dan pertumbuhan. Kebijakan ini diterapkan dengan tiga target utama yaitu pengurangan kemiskinan, kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2014).

Inklusi keuangan selain dapat mengatasi ketimpangan pendapatan juga berpotensi untuk meningkatkan stabilitas keuangan, hal ini dikarenakan akses masyarakat miskin ke tabungan lembaga keuangan formal dapat meningkatkan kapasitas rumah tangga dalam mengelola kerentanan keuangan yang diakibatkan oleh dampak buruk krisis, mendiversifikasi basis pendanaan dari lembaga keuangan yang dapat mengurangi guncangan ketika terjadi krisis global, meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mempercepat pertumbuhan, memfasilitasi diversifikasi dan mengurangi kemiskinan (Hanning dan Jansen, 2010).

Kemiskinan masih menjadi salah satu hambatan bangsa Indonesia dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*), sedangkan inti dari permasalahan kemiskinan adalah batasan-batasan kesejahteraan itu sendiri (World Bank, 2000). Menurut (Prayitno & Arsyad, 1986) kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang di Asia masih membutuhkan berbagai kebijakan untuk dapat menuntaskan masalah kemiskinan tersebut. Terdapat berbagai upaya yang dapat di terapkan untuk menurunkan angka kemiskinan, baik dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Salah satu cara penuntasan kemiskinan adalah melalui jalur keuangan. Penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran setan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan dan memungkinkan untuk tercapainya mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya [ CITATION Dix13 \l 1033 ].

Bank Dunia (2010) melaporkan hanya 21 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses ke bank dan 2 persen lainnya melakukan layanan keuangan non-bank formal. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan di Indonesia memang sangat rendah jika dibandingkan negara-negara maju lainnya.

Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang kepemilikan rekening di sektor keuangan formalnya sangat sedikit yaitu sebesar 19,6 persen. Angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di Asian Tenggara seperti Thailand, Vietnam dan Filipina.

Lebih dari setengah penduduk Indonesia tidak memiliki akun di institusi keuangan. Jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 2014 berjumlah 255,1 juta (Bank Dunia, 2015) hanya sekitar 91,7 juta atau 35,95 persen yang memiliki akun di institusi keuangan. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Akses terhadap institusi yang tidak terjangkau, ketersediaan jasa keuangan yang tidak memadai, kurang pemahaman dan pengetahuan untuk menggunakan jasa-jasa keuangan serta mahalnya biaya untuk mengakses jasa keuangan menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan. Padahal pembelian jasa-jasa keuangan sebaiknya banyak diberikan kepada kelompok berpendapatan rendah, karena selain dapat meningkatkan stabilitas ekonomi namun juga dapat membantu keberlanjutan aktivitas ekonomi lokal [ CITATION Han10 \l 1033 ].

Sistem keuangan memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Levine, 1997). Mengestimasi hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan di Indonesia di mana inklusi keuangan melalui program kredit mikro dapat meningkatkan status sosial maupun status ekonomi masyarakat (Sanjaya, 2014). Karena adanya perputaran uang dan pendistribusian uang yang lebih merata sampai ke masyarakat kelas bawah. Hal ini akan lebih besar manfaatnya apabila kredit mikro akan digunakan untuk berwirausaha. Karena peningkatan pinjaman oleh UMKM akan meningkatkan stabilitas keuangan yang digambarkan oleh semakin menurunnya NPL (*Non Performing Loan*) (Morgan dan Pontines, 2014).

Pada level negara inklusi keuangan dapat meningkatkan efisiensi dalam intermediasi keuangan melalui peningkatan tabungan domestik dan investasi sehingga mendorong stabilitas keuangan (Prasad, 2010). Stabilitas keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam langkah pembangunan ekonomi. Stabilitas merupakan mekanisme ekonomi melalui penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebuah sistem keuangan yang stabil mampu secara efisien mengalokasikan sumber daya, menilai dan mengelola risiko keuangan, mempertahankan tingkat kerja dan menghilangkan pergerakan harga relatif aset riil atau keuangan yang akan mempengaruhi stabilitas moneter. Sistem akan menyerap guncangan terutama melalui mekanisme *self-corrective*, mencegah efek samping dari memiliki efek mengganggu pada ekonomi riil atau pada sistem keuangan lainnya [CITATION Wor16 \l 1033 ].

Terdapat empat target yang harus disentuh oleh kebijakan inklusi keuangan yaitu masyarakat yang sangat miskin, masyarakat miskin yang produktif, masyarakat yang mendekati garis kemiskinan dan masyarakat tidak miskin. Masyarakat miskin tentu saja menjadi target utama dari kebijakan ini.

Bank Indonesia sebagai instrumen yang menjalankan kebijakan ini telah melakukan berbagai strategi guna mengencarkan inklusi keuangan di Indonesia. Ada enam pilar inklusi keuangan yang di terapkan di Indonesia, yaitu *financial education, public finance facility, mapping of finance information, supporting regulation/ policy, intermediary/distribution facility, dan costumer protection* (Bank Indonesia, 2014).

Dengan adanya strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Penggunaan jasa keuangan menjadi lebih luas, merata dan efektif.

Sehingga kebijakan inklusi keuangan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dapat mencapai tujuannya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Inklusi keuangan adalah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi (Sarma,2008). Tingkat inklusi keuangan dapat meningkat sebagai respon terhadap kemakmuran dan ketidaksetaraan yang menurun. Faktor lain yang dapat berhubungan dengan pengecualian keuangan adalah sektor kerja (Goodwin dkk, 2000). Anwar dkk (2016), meneliti tentang Peran Inklusi Keuangan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan yang dihadapi oleh masalah geografi terhadap kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel pada tahun 2005 - 2013 dari 31 provinsi di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan inklusif terhadap investasi dan pertumbuhan serta dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan. Hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan antara pulau yang investasinya lebih tinggi seperti Jawa dan Sumatera memiliki kemiskinan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia.

Githarie dkk (2014) meneliti tentang akses kredit terhadap rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu yang menghalangi akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya kredit usaha. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan melakukan latihan mikroekonomi dengan memanfaatkan data Susenas 2008 dan 2012. Hasil penelitian ini memberikan profil rumah tangga dan mengidentifikasi faktor penentu rumah tangga untuk mengakses kredit usaha dari beberapa sumber, yaitu bank, non bank, dan perorangan. Probabilitas rumah tangga untuk mendapatkan kredit usaha dipengaruhi oleh karakteristik demografi (umur, jenis kelamin, status perkawinan, lokasi, pendidikan) dan faktor sosial ekonomi (sektor pekerjaan, status pekerjaan, status kemiskinan) dan efektivitas pelaksanaan perbankan. Penelitian tersebut menggunakan metode multinomial logit. Temuan penelitian ini sangat penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dienillah dan Anggraeni (2016), meneliti tentang dampak dari inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di Asia, penelitian ini melihat perkembangan dari tujuh negara Asia yang telah menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu strategi pertumbuhan inklusif, yaitu Korea Selatan, Turki, Thailand, Malaysia, Indonesia, India, dan Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif pada tingkat signifikansi 5 persen antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan adalah inklusi keuangan, stabilitas keuangan pada periode sebelumnya, arus modal non-FDI terhadap PDB, rasio aset lancar terhadap deposito dan pendanaan jangka pendek, dan PDB per kapita. Dengan demikian peningkatan penyertaan keuangan, aktiva lancar perbankan, PDB per kapita, dan investasi portofolio dapat menjadi strategi untuk memperbaiki stabilitas keuangan (*Bank Z-Score*) pada tahun yang ditentukan dan tahun depan.

Morgan dan Pontines (2014), meneliti tentang hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas system keuangan. literatur menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang lebih besar bisa menjadi positif atau negatif untuk stabilitas keuangan. Efek positif meliputi: diversifikasi aset bank, sehingga mengurangi keberisikoan mereka; peningkatan stabilitas basis deposito mereka, mengurangi risiko likuiditas; dan peningkatan transmisi kebijakan moneter. Efek negatif termasuk erosi standar kredit (misalnya, *subprime*), Bank risiko reputasi, dan regulasi yang tidak

memadai dari LKM. Secara khusus, kita menemukan bukti bahwa peningkatan bagian pinjaman kepada UKM di total kredit perbankan membantu stabilitas keuangan, terutama oleh penurunan NPL dan kemungkinan lebih rendah dari default dengan lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan, setidaknya oleh UKM, akan mendapatkan manfaat sisi kontribusi untuk stabilitas keuangan juga.

Hanning dan Jansen (2010), meneliti tentang inklusi keuangan dan stabilitas system keuangan serta kebijakan yang mendukung keduanya. Penelitian telah mengungkapkan permintaan terpendam yang besar untuk penghematan formal yang membantu mengatasi hambatan kredit mahal untuk ekspansi bisnis. Akibatnya, pendapatan dan pengeluaran tumbuh, dan hasil kesehatan terbukti lebih tahan terhadap gejolak. kapasitas rumah tangga yang lebih baik untuk mengelola risiko membebaskan pengeluaran publik selama masa krisis. inklusi keuangan juga telah terbukti mengurangi ketimpangan pendapatan. kohesi sosial yang lebih kuat membantu mencegah ketidakstabilan politik dan memungkinkan perhatian penuh untuk manajemen krisis. jaring pengaman sosial secara bersamaan dapat meningkatkan inklusi keuangan ketika manfaat yang disampaikan melalui rekening bank dasar di sektor keuangan formal. Dengan krisis subprime yang menggambarkan bahaya praktik pinjaman sembrono, perlindungan konsumen telah muncul dalam agenda kebijakan.

Park dan Mercado (2014), meneliti tentang Inklusi keuangan, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan dalam Mengembangkan Asia. Inklusi keuangan sering dianggap sebagai elemen penting yang membuat pertumbuhan inklusif sebagai akses pembiayaan dapat mengaktifkan agen ekonomi membuat konsumsi dan investasi keputusan jangka panjang, berpartisipasi dalam kegiatan produktif, dan mengatasi guncangan jangka pendek yang tak terduga. Memahami hubungan antara inklusi keuangan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan di tingkat negara akan membantu pembuat kebijakan merancang dan mengimplementasikan program-program yang akan memperluas akses ke layanan keuangan, yang mengarah ke pengurangan kemiskinan dan kesetaraan pendapatan.

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data dari tahun 2007 hingga tahun 2015. Data tersebut diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bank Dunia, Fred, FINDEX serta instansi terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan data runtun waktu mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2016. Data yang digunakan untuk menganalisis inklusi keuangan di Indonesia maka digunakan data Indeks inklusi keuangan, jumlah kantor bank, jumlah kredit, dan skor literasi keuangan Indonesia. Untuk melihat ketercapaian kebijakan inklusi keuangan di Indonesia maka digunakan data PDB, PDB per kapita, *Poverty Headcount*, *Non Performing Loans* dan *Bank Z-score*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini ingin melihat bagaimana keadaan dan penerapan kebijakan inklusi keuangan serta kesejahteraan di Indonesia. penelitian deskriptif mempunyai karakteristik yaitu Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena atau keadaan apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-terat, mengutamakan obyektivitas dan dilakukan secara cermat dan tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan dan tidak adanya uji.

Tujuan metode deskriptif yaitu untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian dengan apa adanya. Hasil review artikel digunakan untuk melihat tujuan, strategi, hambatan dan penerapan kebijakan inklusi keuangan di Indonesia.

Hasil tersebut akan digunakan untuk melihat ketercapaian target yang diinginkan serta dapat memberi rekomendasi untuk mengencarkan kebijakan Inklusi keuangan

## HASIL PEMBAHASAN

Bank Indonesia sebagai pihak yang mengimplementasikan kebijakan inklusi keuangan di Indonesia dalam hal ini tidak menjadi satu-satunya lembaga yang berperan dalam menyukseskan kebijakan ini. Inklusi keuangan di Indonesia memiliki beberapa saluran utama. Institusi keuangan menjadi saluran utama yang menjadi wadah berkembangnya sistem jasa-jasa keuangan yang efektif dan merata. Institusi keuangan dalam hal ini bisa berupa bank maupun *non-bank*. Tidak hanya institusi keuangan yang berperan dalam kebijakan inklusi keuangan, namun pemerintah juga memiliki peran yang besar dalam berjalannya kebijakan ini. Pemerintah berperan dalam pembuatan regulasi, berbagai macam subsidi dan dukungan secara langsung.

Dalam kerangka kerja inklusi keuangan yang dirancang oleh Bank Indonesia, terdapat enam pilar yang menjadi strategi utama dalam menjalankan dan menyukseskan kebijakan ini. Enam pilar tersebut adalah pendidikan keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan penunjang, fasilitas perantara dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen.

Keenam pilar tersebut memiliki program tersendiri. Berbagai program yang dirancang telah diimplementasikan sejak tahun 2012. Pilar pertama yaitu pendidikan keuangan memiliki tiga program utama. Program tersebut adalah pendidikan untuk siswa, kampanye hari menabung, pendidikan keuangan kepada TKI serta survei literasi keuangan. Pada tahun 2012 program pendidikan keuangan telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar, SMP, SMA di beberapa sekolah percontohan. Pada 2013. Pendidikan keuangan telah menjadi kurikulum di SD, SMP, SMA dan madrasah di Jawa Barat. Kemudian kampanye hari menabung nasional yang pertama diadakan pada tahun 2012 dioptimalkan pada tahun 2013.

Pendidikan keuangan tidak hanya diberikan kepada siswa sekolah saja, tetapi kepada TKI (tenaga kerja Indonesia) juga diberikan. Mengingat salah satu target dari inklusi keuangan adalah pekerja migran. Pada 2013 pendidikan keuangan yang diberikan kepada TKI telah memiliki standar ajar berupa modul. Dan yang terakhir yang menjadi program pendidikan keuangan adalah survei literasi keuangan atau survei melek keuangan yang dilaksanakan di lima area. Pada tahun 2013 survei ini telah memiliki hasil.

Selanjutnya adalah program-program yang diprogramkan pada pilar pemerataan informasi keuangan. Program utama pada pilar ini adalah membuat nomor identitas keuangan atau *financial identity number* (FIN) untuk tahun 2012-2013. Selain itu pilar ini juga mengumpulkan data masyarakat *unbanked* melalui survey yang komprehensif dan mendasar. Program tersebut terus mengalami perbaikan dan pengembangan di tahun berikutnya.

Kemudian adalah pilar mengenai kebijakan dan regulasi penunjang. Pada tahun 2012 Bank Indonesia membuat peraturan multi-perizinan bagi bank dan memperbaiki efektivitas operasional perbankan. Pada tahun selanjutnya pilar ini ikut mendukung pelaksanaan *Branchless Banking*.

Pilar terakhir yang memiliki program andalan adalah fasilitas perantara dan saluran distribusi. Pilar ini memiliki tiga program utama, yaitu tabunganku, *branchless banking* dan *start-up credit*. Pada tahun 2012 program tabunganku dijalankan dengan mengkampanyekan program tabunganku secara nasional. Begitu juga pada tahun setelahnya. Kemudian penyelesaian konsep *branchless banking* pada tahun 2012 dan diimplementasikan di delapan provinsi pada tahun 2013. Terakhir merancang model dasar dari *start-up credit* pada tahun 2012 dan penyelesaian konsep di tahun 2013.

Inklusi keuangan dapat diukur dengan indeks inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan

atau disingkat dengan IFI (*Index of Financial Inclusion*) berkisar antara 0-1. Apabila suatu negara memiliki IFI kurang dari 0,3 maka inklusi keuangan negara tersebut dikatakan rendah, jika berkisar antara 0,3-0,6 maka negara tersebut kategori inklusi keuangan sedang, dan jika IFI berkisar antara 0,6-1 maka negara tersebut dikategorikan negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi (Sarma, 2012). Sanjaya dan Nursechafia (2016) melakukan penelitian untuk mengukur indeks inklusi keuangan di Indonesia dan hasilnya Indonesia berada dikisaran 0,3 yang artinya Indonesia merupakan negara dengan tingkat inklusi keuangan sedang, namun hampir rendah.

Indeks inklusi keuangan mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi akses, dimensi penggunaan dan dimensi kualitas (Bank Indonesia, 2016). Dimensi akses dapat digambarkan melalui jumlah kantor bank dan jumlah ATM. Kemudian dimensi penggunaan dapat diukur dengan jumlah rekening dana pihak ketiga dan jumlah rekening kredit. Dan yang terakhir dimensi kualitas dapat dilihat melalui skor literasi keuangan, dari hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016 yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa ada peningkatan sebesar 7,82 persen dari survei sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 21,84 persen menjadi 29,66 persen ditahun 2016.

Data-data yang tersedia untuk melihat variabel-variabel dari penelitian ini meliputi data indeks inklusi keuangan, jumlah kantor bank, jumlah kredit rumah tangga, skor literasi keuangan, produk domestik bruto, *bank z-score*, *non performing loan* dan *rasio poverty headcount*. Data yang tersedia sangat minim, sehingga analisis data ini hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2010-2014.

Pada tahun 2010 indeks inklusi keuangan Indonesia berada pada poin 0,313, poin ini meningkat sebesar 0,001 poin dari tahun sebelumnya. Pada saat indeks inklusi keuangan di Indonesia sebesar 0,0313 jumlah kantor bank yang ada di Indonesia sebanyak 13.837 unit dan jumlah kredit rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 25,8 persen, produk domestik bruto Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 25,5 persen kemudian *rasio poverty headcount* Indonesia mengalami penurunan sebanyak 13,8 persen *bank z-score* yang merupakan proxy dari stabilitas keuangan naik sebesar delapan persen. *Non performing loan* meningkat 6,8 persen yang artinya jumlah kredit macet meningkat sebesar tersebut.

Tahun 2011 indeks inklusi keuangan Indonesia menurun sebanyak 0,003 poin dari tahun sebelumnya, IIK yang menurun ini tidak sebanding dengan keadaan jumlah kantor bank dan jumlah kredit rumah tangga yang mengalami peningkatan masing-masing 43,7 persen dan 20,9 persen. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat, hal ini terlihat dari jumlah PDB yang meningkat sebesar 15,4 persen, *rasio poverty headcount* juga mengalami penurunan sebesar tujuh persen dari tahun sebelumnya, stabilitas keuangan juga meningkat yang ditandai meningkatnya *bank z-score* sebesar tujuh persen. Jumlah kredit macet pun juga menurun sebesar 65 persen.

Di tahun 2012 Iik meningkat lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 0.010 poin, jumlah kantor bank dan jumlah kredit rumah tangga sama-sama meningkat masing-masing sebesar 8,6 persen dan 10,5 persen. Pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 2,7 persen, *rasio poverty headcount* juga mengalami penurunan sebesar empat persen. Stabilitas sistem keuangan juga lebih stabil terlihat dari *bank z-score* yang meningkat dan NPL yang menurun masing-masing sebesar 2,25 persen dan 20,2 persen.

Pada tahun 2013 IIK kembali meningkat sebanyak 0,008 poin, dimana IIK pada tahun ini menjadi indeks yang tertinggi dalam rentan waktu 2008-2014 yaitu sebesar 0.328. tahun ini juga bertepatan dengan terimplementasinya berbagai program inklusi keuangan yang telah dirancang sejak tahun 2012. Jumlah kantor bank pada tahun 2013 meningkat sebesar 6,5 persen, namun jumlah kredit rumah tangga menurun sebanyak 10 persen. Produk domestik bruto pada tahun ini mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,6 persen. *Rasio poverty*

*headcount* mengalami penurunan sebanyak 5,8 persen. Stabilitas sistem keuangan juga lebih stabil dari tahun sebelumnya karena *bank z-score* meningkat dan NPL menurun, masing-masing sebesar 1,1 persen dan 5,3 persen.

Pada tahun 2014 IIK mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,006 poin. Jumlah kantor bank dan jumlah kredit rumah tangga sama-sama mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,6 persen dan delapan persen. Namun PDB pada tahun ini menurun sebesar 2,4 persen, *rasio poverty headcount* juga menurun sebesar delapan persen. *Bank z-score* meningkat sebesar tiga persen namun NPL mengalami peningkatan 18,3 persen.

Selama kurun waktu lima tahun tersebut terlihat bahwa indikator inklusi keuangan berupa dimensi akses, dimensi penggunaan memiliki trend yang hampir sebanding dengan tiga target inklusi keuangan berupa pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan stabilitas sistem keuangan. Dimana pada saat jumlah kantor bank dan jumlah kredit rumah tangga meningkat akan terlihat PDB yang cenderung meningkat, *rasio poverty headcount* menurun dan stabilitas sistem keuangan lebih stabil.

Kemudian, indeks inklusi keuangan juga memperlihatkan memiliki trend yang cenderung cocok dengan dua dimensi indikator dari kebijakan inklusi keuangan di tahun sebelumnya. IIK yang meningkat di tahun ini memperlihatkan keadaan jumlah kantor bank dan jumlah kredit rumah tangga yang meningkat di tahun sebelumnya dengan skala yang hampir mirip.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Inklusi keuangan sudah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 2000. Kemudian menanggapi krisis ekonomi global pada tahun 2008, KTT G20 di Pittshburg Amerika Serikat menyetujui menjadikan kebijakan inklusi keuangan menjadi salah satu strategi yang akan diterapkan oleh negara-negara G20 untuk mengatasi krisis global tersebut dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012 Indonesia telah merancang kerangka kerja yang meliputi target, sasaran, visi & misi, serta strategi yang akan dijalankan guna peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Kemudian kerangka kerja tersebut di Implementasikan pada tahun 2013.

Meskipun peningkatan inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun masih jauh dengan target yang diinginkan, sehingga masih harus terus ada strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target yang diinginkan. Secara umum kebijakan inklusi keuangan tidak memperlihatkan adanya korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Namun secara lebih spesifik dimensi akses memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan dimensi penggunaan yang memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi

Dalam skala yang lebih luas inklusi keuangan juga tidak memiliki hubungan secara langsung dengan tingkat pengurangan kemiskinan di Indonesia. Namun jika dilihat lebih mendalam dimensi akses memiliki pergerakan data yang sama dengan tingkat kemiskinan di Indonesia pada runtun waktu yang sama. Pada dimensi penggunaan juga terjadi kemiripan data antara dimensi penggunaan dan tingkat kemiskinan. Dimana data kredit rumah tangga cenderung meningkat dan data *rasio poverty headcount* cenderung menurun.

Secara umum kebijakan inklusi keuangan di Indonesia terlihat memperlihatkan hubungan secara langsung terhadap stabilitas sistem keuangan. Begitu juga dengan dimensi akses. Namun berbeda dengan dimensi penggunaan yang menggunakan proxy kredit rumah tangga yang memperlihatkan semakin rendah jumlah kredit rumah tangga maka semakin kecil kredit macet (NPL) yang terjadi.

## **Saran**

Kebijakan inklusi keuangan di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju di dunia. Oleh karena itu pemerintah, Bank Indonesia serta lembaga-lembaga lain yang ikut berperan dalam terselenggaranya kebijakan inklusi keuangan di Indonesia harus terus meningkatkan dan memperkuat strategi nasional baik pada dimensi akses, penggunaan dan kualitas secara efektif dan efisien.

Sistem *branchless banking* harus terus diterapkan dan dioptimalkan kembali. Pemerintah dan otoritas perbankan dapat membuat sistem dan aturan yang lebih pro terhadap masyarakat menengah kebawah. Perbankan ikut mengarahkan nasabah penerima pinjaman untuk mengelola dana pinjamannya, sehingga perbankan sendiri dapat mengurangi kerentanan terhadap kredit macet. Kemudian pemerintah dan Bank Indonesia masih harus terus menggenjatkan edukasi jasa-jasa keuangan. Masyarakat harus mulai meningkatkan literasi keuangan dan menggunakan jasa-jasa keuangan karena jasa keuangan memiliki hubungan secara langsung terhadap stabilitas sistem keuangan dan secara tidak langsung juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan

Bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini disarankan untuk mencari data lebih dalam lagi tentang inklusi keuangan serta melihat ketercapaian inklusi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, A. I., Uppun, P., & Abdi, T. I. (2008). The Role of Financial Inclusion to Poverty Reduction in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 18 37-39.
- Beck, T., Demique, K., & Peria, M. (2007). Reaching Out: Access to and Use of Banking Service Across Countries. *Journal of Financial Economics*, 85: 234-236.
- Buckland, J., Guenther, B., Boichev, G., Geddie, H., & Mutch, M. (2005). There Are No Banks Here: Financial and Insurance Exclusion Service in Winnipeg's North End. *Winnipeg Inner-City Research Alliance*.
- Carbo, S., Gardenier, E., & Molyneux, P. (2005). Financial Exclusion. *Palgrave MacMillan*.
- Cheng, X., Degryse, H.A., 2006. The Impact of Bank and Non-Bank Financial Institutions on Local Economic Growth in China, *Discussion Paper 2006-2009*.
- Dienillah, A., & Anggraeni, L. (2014). Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18 No. 04.
- Dixit, R., & Gosh, M. (2013). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India Study of Indian States. *International Journal of Bussines Management & Research*, 147-156.
- Elly Karmeli, S. F. (2008). Krisis Ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*.
- Furchan, A. 2004. *Pengantar Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Gitaharie, B. Y., Soelistianingsih, L., & Djutaharta, T. (2004). Financial Inclusion: Household Access to Credit In Indonesia. *Working Paper in Economics and Business*, Vol.4 No. 01.
- Goodwin, M., Jones, R., Pett, K., & Simpon, G. (2002). Revolution and Economics Governences in the UK: *Uneven Geographies Uneven Capacities*.
- Hanning, A., & Jansen, S. (2010). Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues. Asian Development Bank Institute Working Paper, 259.
- Bank Indonesia. (2014). Financial Inclusion Development Policy in Indonesia. *Banking Reasearch and Regulation Department*.
- Jorgenson, D. W. 1995. *International Comparisons of Economic Growth*. Cambridge: The MIT Press.
- Karmeli, E.D. (2008). Krisis Ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*.
- Kempson, E., & Whyley, C. (1999). Undertanding and Combating Financial Exclusion. *Insurance Trends*, 18-22.
- Kempson, E., Alkinson, A., & Pilley, O. (2004). Policy Level Response to Financial Exclusion in Developed: Lessons for Developing Countries. *Report of Personal Finance Research Centre*, University of Bristol.
- Levine R. 2005. Finance and Growth: Theory and Evidence, Handbook of Economic Growth, in Aghion. Vol. 1, 865-934.
- Levine, R. 1997. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, *Journal of Economic Literature*, Vol. 35: 688-726.
- Leyshon, A., & Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abondament In Britain and the United State Transacion. *Institute of British Geographers, New Series*, 312-410.
- Madura, J. 2002. *International Financial Management*, USA: South Westhern. Collange Publishing.
- Mankiw, N. 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mankiw, N.G. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Merton, Robert C., & Zvi Bodie. (1995). Financial Infrastructure and Public Policy: A Functional Perspective. *The Global Financial System: A Functional Perspective*.
- Mishkin, F. 2008. *In The Economic of Money, Banking, and Financial Markets 8<sup>th</sup> Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

- Mishkin, F. S. (2009). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Ninth Edition*, Perason.
- Mohan, R. (2006). Economic Growth, Financial Deepening and Financial Inclusion. *RBI Bulletin*.
- Morgan, P. J., & Pontines, V. (2014). Financial Stability and Financial Inclusion. *ADB Working Paper Series*. No. 488.
- Park, Y., & Mercado, V. R. (2015). Financial Inclusion, Proverty and Incomenequality in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper*, No. 426.
- Peachey, Stephen & A. Roe. 2004. *Access to Finance : A Study for The World Savings Banks Institute*. Oxford: Oxford Policy Management.
- Prayitno, H., & Arsyad, I. (1986). *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPEE.
- Sharma, P., & Sachdeva, S. (2014). Financial Inclusion in India, Issues and Challenges. *International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR)*, Vol. 3 No. 6.
- Stiglits, J. (1999). *Bleak Growth Prospect For The Developing World*. International Herald Tribune. Hal. 6.
- Sukirno, S. 2008. *Makroekonomi: Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tama, C. M. (2016). *Financial inclusion dan Financial Deeping di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Tambunan, T. T. (2016). Financial Inclusion and MSMEs Access to Bank Loans: A Story From Indonesia. *International Research Journal of Management & Social Science*.
- Thiel, M. 2001. Finance and Growth: A Review of Theory and the Available Evidence. Directorate General for Economic and Financial Affairs, *Economic Paper*, No. 158.
- World Bank. (2016). *Financial Stability*.
- Voana, A. 2005. Regional Evidence on the Finance Growth Nexus. *Working Papers 30*, University of Verona, Department of Economics.
- Zulkifly. (2012). *Krisis Keuangan di Indonesia*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.